

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) adalah sistem pendokumentasian, pengelolaan dan pengolahan data perencanaan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada publik dan sebagai dokumen pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah (Winarno et al., 2019). Tujuannya adalah untuk memanfaatkan data dan informasi pembangunan daerah dengan sebaik-baiknya. Program SIPD dibagi menjadi beberapa fase, memungkinkan pengguna di tingkat terendah, desa, untuk mengelola data ide atau keluhan masyarakat, proposal yang dibuat, dan data yang dimasukkan oleh desa yang mungkin diprioritaskan. Desa juga dapat mengelola data usulan untuk diteruskan ke tingkat kabupaten. Ini akan dipindahkan ke tingkat yang lebih tinggi, terutama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagai manajer perencanaan (BAPPEDA).

Bappedalitbang sebagai salah satu instansi pemerintah yang diuntut untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik yaitu dengan cara mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik Bappedalitbang Kabupaten Bogor selaku unit perencanaan di haruskan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan (Fahrizanur et al., 2017). Dalam penyusunan perencanaan daerah

yang baik harus di dukung dengan data yang akurat beserta informasi yang relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi dari satu kesatuan sistem pembangunan nasional, yang dikaitkan dengan data pemerintah daerah dan menjadi pedoman dalam membangun pembangunan daerah. Rencana pembangunan daerah harus dibangun di atas data dan informasi yang akurat dan andal untuk mengatasi masalah, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, program, dan kegiatan (Bappedalitbang, 2019). Dengan digunakannya sistem informasi pemerintah daerah maka akan memudahkan transparansi informasi publik yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, para instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, kementerian dan lembaga akan lebih mudah dalam menarik data pembangunan secara cepat dan juga akurat. SIPD ini mencakup semua aspek anggaran pemerintah daerah, mulai dari dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai penatausahaan. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi mandat untuk menetapkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang mana apabila tidak diterapkan akan berpengaruh pada penilaian kinerja pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sekaligus menekankan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam SIPD sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014, pasal 274. Berdasarkan evaluasi kinerja Kabupaten Bogor tahun 2020, capaian indikator makro yaitu IPM, kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pembangunan, serta laju pertumbuhan ekonomi telah mengalami penurunan.

Maka dari itu, untuk membangun satu data Indonesia telah diawali pemerintah pusat dengan memberlakukan SIPD. Bupati Bogor, Ade Yasin memerintahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Bogor segera menata dan menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor mulai menerapkan SIPD pada tahun 2020 untuk merumuskan perencanaan pembangunan 2021. Dengan diterapkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah dapat memberikan data yang akurat dan akuntabel yang diperlukan dalam perencanaan pembangunan serta dapat digunakan *stakeholders* tingkat pusat, masyarakat umum serta dunia usaha.

Sebelum penggunaan SIPD, Bappedalitbang mengalami kesulitan karena proses penyusunan dilakukan secara manual menggunakan *excel* atau *microsoft access* yang datanya diinput secara manual sehingga datanya tidak terpantau secara langsung. Selain itu, pengumpulan data yang cenderung kurang efisien karena seringnya molor dalam pengumpulan data oleh dinas besar seperti Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas kesehatan karena banyak data dan kegiatan. Masalah lain yang dihadapi pada saat sebelum menggunakan SIPD yaitu adanya perubahan/tambahan kegiatan di tengah jalan sehingga mengharuskan Bappedalitbang mengubah secara manual dokumen perencanaan (Wawancara dengan Operator SIPD Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2021).

Proses implementasi SIPD di Kabupaten Bogor sering mengalami permasalahan atau kendala dalam pelaksanaannya, khususnya yang berkaitan

dengan implementasi perilaku organisasi dan antar organisasi (*Organizational and Inter-Organizational behavior*), perilaku level bawah (*Street Level Buraucratic behavior*) dan perilaku target sasaran (*Target Group bevavior*). Dilansir dalam (Antaramegapolitan,2021) kendala ini di temukan karena pasalnya pejabat yang menggunakan sistem masih banyak yang belum paham dan mengalami kesulitan dengan kata lain sumber daya di Kabupaten Bogor masih belum memumpuni, sehingga kembali mengelola keuangan dalam penganggaran menggunakan SIMRAL, untuk saat ini pencairan dana Kabupaten Bogor masih menggunakan SIMRAL, dan penganggaran tetap menggunakan SIPD.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah di uraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Pembangunan Daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor**”, mengingat belum adanya penelitian yang membahas terkait Sistem Informasi Pemerintah Daerah khusus nya Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam menyusun perencanaan Pembangunan di BAPPEDALITBANG Kabupaten Bogor?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan capaian dalam suatu kegiatan penelitian, dan setiap penelitian harus memiliki arah dan tujuan yang pasti. Penelitian tidak akan berjalan dan memberikan hasil yang diharapkan kecuali ada arah dan tujuan yang jelas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) digunakan dalam pembangunan daerah di Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Pembangunan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan tinjauan pustaka, *Research gap* dengan penelitian terdahulu adalah belum adanya penelitian mengenai sistem informasi pemerintah daerah Kabupaten Bogor khususnya di bidang perencanaan. Maka dari itu penelitian ini di harapkan memberikan manfaat dengan memberikan hasil analisis terhadap di terapkannya Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Bappedalitbang Kabupaten Bogor dalam meningkatkan perencanaan pembangunan daerah khususnya dalam bidang perencanaan. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pengembangan ilmu pemerintahan khususnya pada sistem infomasi pemerintahan serta dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hal yang sama.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini di harapkan dapat mengembangkan kemampuan dan penguasaan ilmu-ilmu yang di peroleh oleh peneliti. Selain itu hasil penelitian ini dapat di jadikan rekomendasi terhadap stakeholders seperti pemerintah daerah Kabupaten Bogor dan kelompok *civil society* sebagai bahan tinjauan untuk memperbaiki kualitas perencanaan pembangunan. Selanjutnya diharapkan pemerintah daerah lain yang memiliki permasalahan yang sama dapat menjadikan penelitian ini sebagai studi banding.

1.5. Tinjauan Pustaka

Hasil penelitian yang dijadikan sebagai tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah tentang sistem informasi pemerintah daerah yaitu yang pertama, yang di tulis oleh Sudianing & Seputra dengan judul “Peran Sistem Informasi Pemerintah Daerah Dalam Menunjang Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah” dari hasil penelitian ini menyebutkan bahwa Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sangat penting untuk menunjang terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas. Selain itu, SIPD menjadi bagian dari *e-government* yang memiliki fungsi penting dalam perencanaan pembangunan daerah untuk menghasilkan pemerintah yang responsif terhadap persoalan yang ada di daerah, dan juga dapat meningkatkan partisipasi dan demokrasi dalam perencanaan daerah serta dapat mendorong transparansi publik di daerah. Yang menjadi perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang di lakukan adalah masalah yang di teliti, dalam jurnal ini memfokuskan pada sistem informasi pemerintah daerah dalam kualitas perencanaan pembangunan.

Kedua, jurnal yang di tulis oleh Nanda Dias Ekaputra dengan judul “Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Penyusunan Dokumen RKPD Di Kabupaten Nganjuk”. Penerapan SIPD di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk diamati dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Berdasarkan temuan penelitian ini, penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Nganjuk cenderung kurang efektif jika dilihat dari kualitas hasil yang dihasilkan karena nomenklatur program dan kegiatan berubah. secara keseluruhan mempengaruhi output yang dihasilkan dari kegiatan yang dilakukan. Ini tidak mengikuti dokumen RPJMD sebelumnya. Aplikasi yang digunakan untuk memasukkan program, kegiatan, dan data membatasi penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pemmembuatan dokumen RKPD Kabupaten Nganjuk. Belum selesainya sub kegiatan, kemungkinan karena server SIPD belum mampu menangani semua area yang aksesnya bisa dibilang simultan sehingga menyebabkan tertundanya proses input kegiatan yang nantinya akan menjadi RKPD. Selain itu, pemahaman pengguna tentang cara menggunakan aplikasi SIPD masih terbatas, begitu juga dengan perubahan peraturan baru seputar nomenklatur dan kegiatan program, sesuai Permendagri nomor 70 tahun 2019.

Ketiga, jurnal yang di tulis Citta Nadya Celline Wurara, dkk. yang berjudul “Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Di Kota Manado” penelitian ini meneliti implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah menggunakan teori implementasi Kebijakan menurut George

C.Edwards III yang meliputi, komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tidak terlaksananya sistem informasi pemerintah daerah secara penuh disebabkan kurangnya efisiensi waktu, yang terjadi karena banyak OPD yang tidak dapat menginput data dengan tepat waktu, sebagaimana waktu yang telah di tentukan oleh Bappelitbangda. Sistem informasi pemerintah daerah ini sudah dioperasikan oleh SDM Bappelitbangda yang kompeten. Berdasarkan temuan penelitian, tidak adanya sumber daya manusia yang berkualitas dari organisasi perangkat daerah menyebabkan keterlambatan dalam menginput data perencanaan, serta masih kurangnya bimbingan teknis, sehingga banyak operator yang masih belum paham menjalankan SIPD.

Keempat, jurnal yang ditulis Muhammad Irfan Nasution dan Nurwan dengan judul “Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah (BPKAD) Kota Medan”. Dalam jurnal ini meneliti implementasi sistem informasi pemerintah daerah dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yang meliputi standae dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi atau sikap para pelaksana dan lingkungan sosial politik ekonomi. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa penerapan sistem informasi pemerintah daerah khususnya di Medan, belum terlaksana dengan baik karena kualitas sistem yang masih kurang, selain itu kurangnya efisiensi dari segi waktu atau singkatnya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan bimbingan teknis menyebabkan banyak SKPD yang belum terbiasa menggunakan SIPD.

Kelima, jurnal yang ditulis Dedeng Hirawan dan Ana Hadiana dengan judul “Perencanaan Strategis Sistem Informasi Dalam Usulan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Subang” menjelaskan mengenai perencanaan strategis yang dilakukan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Subang. Dalam jurnal ini dijelaskan Pemerintah Kabupaten Subang belum mengoptimalkan implementasinya dan memiliki arahan dalam penggunaan sistem informasi yang ideal. Untuk itu diperlukan suatu strategi dan sistem informasi yang keduanya dapat membantu dan meningkatkan kinerja seluruh bagian pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perumusan perencanaan strategis sistem informasi didasarkan pada arah visi dan tujuan Kabupaten Subang, dengan memprioritaskan dan fokus pada tiga sektor, yaitu agribisnis, pariwisata, dan industri. Sehingga peran sistem informasi ini kedepannya sesuai dengan tujuan pengembangan kedepannya.

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Agung Laksana Jamal, dkk. dengan judul “Kajian Tentang Fungsi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Sippd) Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Poso”, penelitian ini membahas perbedaan-perbedaan sebelum dan setelah penggunaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah dalam proses perencanaan pembangunan Kabupaten Poso. Temuan penelitian ini mengungkapkan perbedaan yang signifikan secara statistik. Program Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) sangat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Poso dalam hal mempermudah proses

perencanaan pembangunan dan menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas secara cepat dan benar. Terdapat perbedaan, seperti proses perencanaan pembangunan yang tidak berjalan optimal sebelum pelaksanaan SIPPD, dan proses perencanaan pembangunan berfungsi ideal setelah penerapan SIPPD, yang memungkinkan mereka untuk melakukan operasi perencanaan pembangunan yang berbeda dengan tepat.

Ketujuh, jurnal Rangga Deseverians dan Serly Wulandari yang berjudul “Efektivitas Sistem Informasi Pembangunan Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat” ini meneliti efektivitas dengan teori efektivitas Duncan Hal ini dapat diamati dalam karakteristik pencapaian tujuan, integrasi, dan kemampuan beradaptasi. Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, belum efektif dalam merencanakan pembangunan tahunan daerah. Temuan wawancara dan sampel yang diambil dari wilayah yang diteliti yaitu Kota Pontianak dikuatkan dengan data rekapitulasi persentase skala likert sebesar 48,26% dengan kriteria tidak efektif. Temuan wawancara dan sampel yang diambil dari wilayah yang dianalisis yaitu Kota Pontianak didukung oleh data rekapitulasi persentase dari skala Likert. Lebih tepatnya, 48,26% tidak memenuhi kriteria efektif. Peningkatan koordinasi antar instansi di lingkungan Kota Pontianak dalam rangka pemutakhiran data SIPD oleh OPD yang bertanggung jawab atas validitas dan ketersediaan data, serta peningkatan sarana dan prasarana pendukung untuk membantu pengelolaan dan proses pengisian elemen data di SIPD, serta menjadi tuan rumah diskusi atau pertemuan.

Kedelapan, jurnal yang ditulis Winarno, dkk. yang berjudul “Implementasi Sitem Informasi Pembangunan Daerah Di Kabupaten Tangerang” yang membahas implementasi sistem informasi pemerintah daerah untuk menjawab permasalahan yang ada di Kabupaten Tangerang yakni belum optimalnya integrasi data pembangunan yang bersumber dari organisasi perangkat daerah baik provinsi kabupaten/kota serta instansi vertikal. Selain itu tidak seragamnya indikator format data, tahapan pengelolaan data serta sistem penyajian data sehingga menyulitkan integrasi data. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Tangerang telah berhasil diimplementasikan dengan domain name **sipd.tangerangkab.go.id** dan berhosting di Server Layanan Kominfo. Selanjutnya pengguna dari dinas dan kelurahan di Kabupaten Tangerang sudah dapat memanfaatkan sistem hasil pelatihan bagi pengguna (operator) sehingga dapat menggunakan sistem tersebut. Hasil dari kegiatan ini, masyarakat dapat mengirimkan data pembangunan ke Kabupaten Tangerang, sehingga Kabupaten Tangerang dapat menawarkan statistik pembangunan terkini. Ini sangat berguna untuk pengambilan keputusan di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional.

Kesembilan, Skripsi Reni Kesuma Putri dengan judul “Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Untuk Pelaksanaan Koordinasi Musrenbang Tingkat Desa di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang”. Skripsi ini membahas tentang pemanfaatan sistem informasi pemerintah itu sendiri dalam musrenbang tingkat desa. Hasil dari penelitian skripsi menyimpulkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

untuk Musrenbang tingkat desa sangat membantu para pemangku kepentingan. Strategi penyusunan, pemilahan, dan penyusunan hasil musrenbang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) telah beroperasi, dan semua desa di Kabupaten Deli Serdang telah terhubung dengan internet, sehingga memungkinkan pelaksanaan SIPD melalui internet. Karena data usulan desa dapat dengan mudah diinput ke dalam sistem, penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sebagai *problem solver* atau pemecah masalah untuk memudahkan perencanaan pembangunan di tingkat desa dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) membantu Bappeda dan perangkat desa lainnya yang bertugas memilih gagasan prioritas desa.

Kesepuluh, Skripsi Nur Amanah dengan Judul “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah Di Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Serang” yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah Di Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Serang dengan menggunakan teori implementasi George Edward III yang memiliki indikator sumberdaya, komunikasi, disposisi atau sikap, serta struktur birokrasi. Hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah Di Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Serang dalam penerapannya di lapangan masih belum maksimal dikarenakan masih di temukan kendala dari sumber daya yang masih belum memahami proses

permendagri tersebut. Selain itu, para tim pengelola SIPD masih belum optimal dalam pengelolaannya.

Tabel 1.
Perbandingan Studi Pustaka

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan	
				Peneliti Terdahulu	Penelitian Penyusun
1.	Hirawan & Hadiana, 2015	Perencanaan Strategis Sistem Informasi Dalam Usulan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di Badan Perencanaan dan Pembangunan Bappeda Kabupaten Subang	Mengkaji sistem informasi dalam perencanaan pembangunan	Mengkaji perencanaan strategis dengan menggunakan sistem informasi dalam usulan RPJMD. Kelemahan penelitian ini adalah dalam menganalisis sistem yang berjalan hanya pada sisi teknisnya saja. Seharusnya menganalisis aspek eksternal juga yang mempengaruhi perumusan rencana	Mengkaji bagaimana penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam perencanaan pembangunan. Untuk mengisi gap dari peneliti terdahulu maka peneliti berusaha untuk menganalisis penerapan SIPD dari segala aspek yang mempengaruhi perumusan perencanaan

				strategis.	pembangunan
2.	Jamal & Ahlis.Djirimu, 2016	Kajian Tentang Fungsi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sippd Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Poso	Mengkaji penerapan sistem informasi dalam perencanaan pembangunan	Mengkaji perbedaan sebelum dan sesudah menggunakan Program Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah SIPPD. Dalam tulisannya di bahas bahwa dalam pelaksanaanny a masih terdapat beberapa kendala namun peneliti terdahulu tidak membahas upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi hambatan	Mengkaji sistem Informasi Pemerintah Daerah. Untuk mengisi gap antara peneliti terdahulu, apabila ditemukan hambatan dalam penelitian penerapan sistem informasi pemerintah daerah maka penulis akan mencoba membahas upaya untuk mengatasi hambatan tersebut dalam tulisan peneliti.

				tersebut.	
3.	(Amanah, 2018)	Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah Di Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah BAPPEDA Kota Serang	Mengkaji implementasi sistem informasi pembangunan daerah dalam perencanaan pembangunan daerah	Mengkaji sistem informasi pembangunan daerah yang merupakan bagian dari sistem informasi pemerintah daerah	Mengkaji sistem informasi pemerintah daerah yang mencakup sistem informasi pembangunan daerah
4.	Sudianing & Seputra, 2019	Peran Sistem Informasi Pemerintah Daerah Dalam Menunjang Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persamaan Penelitian ini dan penelitian penulis adalah mengkaji sistem informasi pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan.	Fokus pada peran sistem informasi pemerintah daerah dalam kualitas perencanaan pembangunan. Kelemahan dalam penelitian ini adalah substansi yang	Mengkaji implementasi sistem informasi pemerintah daerah dengan subjek Kabupaten Bogor.

				diteliti kurang spesifik subjeknya. Selain itu, belum di bahas bagaimana upaya untuk menyediakan anggaran dan sumber daya manusia yang memadai agar pengelolaan sistem informasi pemerintah daerah mejadi berkualitas di masa mendatang.	
5.	Winarno et al., 2019	Implementasi Sitem Informasi Pembangunan Daerah Di Kabupaten Tangerang	Mengkaji sistem informasi dalam perencanaan pembangunan daerah	Mengkaji sistem informasi pembangunan daerah yang merupakan bagian dari sistem informasi pemerintah	Mengkaji sistem informasi pemerintah daerah yang mencakup sistem informasi pembangunan daerah. Untuk mengisi gap dengan

				daerah. Kelemahan dalam tulisan ini adalah belum ada dijelaskan bagaimana mengelompokkan data berdasarkan wewenang dan urusan daerah sehingga indikator data menjadi seragam/sama.	penelitian terdahulu maka peneliti akan mengkaji SIPD secara teknis dimana menjelaskan bagaimana untuk mengelompokkan program prioritas
6.	Deseverians & Wulandari, 2020	Efektivitas Sistem Informasi Pembangunan Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat	Mengkaji sistem informasi dalam perencanaan pembangunan daerah	Mengkaji sistem informasi pembangunan daerah yang merupakan bagian dari sistem informasi pemerintah daerah. Kelemahan dari penelitian ini adalah belum	Mengkaji sistem informasi pemerintah daerah yang mencakup sistem informasi pembangunan daerah. Untuk mengisi gap dengan peneliti terdahulu, apa bila peneliti menemukan hambatan yang serupa dalam

				dijelaskan upaya dari terhambatnya penggunaan sipd dalam aspek pencapaian target yaitu masih banyak nya dinas yang dibebankan untuk mengisis data yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenangnya.	penerapan sistem informasi pemerintah daerah maka peneliti akan menjelaskan beserta upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut.
7.	Wurara et al., (2020)	Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Di Kota Manado	Mengkaji implementasi Sistem Informasi pemerintah Daerah	Subjek yang diteliti yaitu BAPPEDALI TBANDA Kota Manado. Dalam tulisannya di bahas bahwa pelaksanaannya masih terdapat hambatan di beberapa aspek namun	Subjek yang diteliti BAPPEDALIT BANG Kabupaten Bogor. Untuk mengisi gap dengan peneliti terdahulu, apa bila peneliti menemukan hambatan yang serupa dalam penerapan

				peneliti terdahulu tidak membahas upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.	sistem informasi pemerintah daerah maka peneliti akan menjelaskan beserta upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut.
8.	Ekaputra, 2021	Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah SIPD Dalam Penyusunan Dokumen RKPD Di Kabupaten Nganjuk	Mengkaji efektivitas sistem informasi pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan	Fokus penelitian penelitian terdahulu pada penerapan SIPD dalam menyusun dokumen RKPD dengan tempat penelitian yaitu di Kabupaten Nganjuk. Dalam tulisannya dibahas dengan detail	Substansi penelitian pada penggunaan SIPD dalam perencanaan pembangunan.

				<p>baik dari hambatan dan upaya dalam menjalankan SIPD ini. Akan tetapi dalam penelitian ini penulis terlalu fokus pada pengelolaan keuangannya saja.</p>	
9.	Nasution & Nurwani, 2021	<p>Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah SIPD pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah BPKAD Kota Medan</p>	<p>Mengkaji penerapan Sitem Informasi Pemerintah Daerah</p>	<p>Fokus penelitian terdahulu adalah mengkaji sistem informasi keungan daerah yang merupakan bagian dari sistem informasi pemerintah daerah dengan subjek penelitian di BKAD Kota</p>	<p>fokus pada sistem informasi pemerintah daerah yang mencakup informasi keuangan daerah yang di kelola oleh BAPPEDALIT BANG Kamembuatan Bogor. Untuk mengisi gap dengan peneliti terdahulu, apa bila peneliti</p>

				Medan. Secara keseluruhan yang menjadi penghambat penerapan SIPD adalah pergantian pemimpin yang menyebabkan keterlambatan dalam menginput data. Namun dalam penelitian ini belum dijelaskan atau disebutkan apa upaya untuk mengatasi hambatan tersebut	menemukan hambatan yang serupa dalam penerapan sistem informasi pemerintah daerah maka peneliti akan menjelaskan beserta upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut.
10.	Putri, 2021	Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah SIPD Untuk Pelaksanaan Koordinasi	Mengkaji pemanfaatan sistem informasi pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan	Mengkaji sistem informasi pemerintah daerah SIPD dalam musrenbang tingkat desa.	Mengkaji sistem informasi pemerintah daerah dalam perencanaan Bappedalitbang Kabupaten

		Musrenbang Tingkat Desa di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang		Dalam tulisan ini tidak dijelaskan bagaimana mengelompokkan data prioritas desa berdasarkan prioritas kabupaten karena dalam SIPD belum terdapat menu prioritas.	Bogor. Untuk mengisi gap dengan penelitian terdahulu maka peneliti akan mengkaji SIPD secara teknis dimana menjelaskan bagaimana untuk mengelompokkan program prioritas.
--	--	---	--	--	--

Dari beberapa penelitian yang telah dijelaskan di atas yang pada dasarnya semua berfokus pada penggunaan sistem informasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, meskipun di atas telah disebutkan beberapa penelitian terdahulu dengan tema yang sama, akan tetapi penelitian ini memiliki subjek, objek, metode dan tempat penelitian yang berbeda dalam mengkaji implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor.

1.6. Kerangka Teori

1.6.1. Implementasi

Kegiatan atau pelaksanaan rencana yang dipikirkan dengan matang dan menyeluruh dikenal sebagai implementasi. Setelah tahap perencanaan selesai, tahap implementasi dimulai. Implementasi,

menurut Usman (2002) didasarkan pada kegiatan, tindakan, atau adanya mekanisme sistem. Implementasi bukan sekedar kegiatan, melainkan kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan kegiatan. Kajian Ripley dan Franklin, Birokrasi dan Implementasi Kebijakan, dikutip dalam buku “Kebijakan Publik: Teori dan Proses (Winarno, 2007)”, yang menjelaskan bahwa implementasi ialah suatu terjadinya proses setelah disahkannya undang-undang yang memberikan kekuasaan program. Keuntungan, Kebijakan, atau hasil nyata adalah contoh hasil nyata. Istilah "implementasi" mengacu pada aktivitas sesuai pernyataan niat pejabat pemerintah mengenai tujuan program dan hasil yang diharapkan. Implementasi merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan oleh sejumlah besar orang untuk melaksanakan suatu program.

Implementasi kebijakan ialah langkah penting pada proses kebijakan publik. Sebuah kebijakan yang dihasilkan dari proses politik harus diubah menjadi kegiatan dan tindakan praktis melalui tahap implementasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Setelah suatu kebijakan melewati tahap perumusan, maka pernyataan kebijakan yang tercakup dalam kebijakan tersebut akan ditentukan dan dilaksanakan dengan berbagai tindakan nyata. Van Metter dan Van Horn dalam (Nasution et al., 2021) mendefinisikan implementasi sebagai jenis penegakan hukum di mana banyak aktor, organisasi, prosedur, dan strategi berkolaborasi untuk menjalankan kebijakan

dalam rangka mencapai tujuan kebijakan atau program umumnya diamati pelaksanaannya.

Proses implementasi kebijakan mencakup semua kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok pemerintah, dan sektor swasta dengan tujuan mencapai tujuan yang digariskan dalam keputusan kebijakan dan mempelajari penyebab keberhasilan dan kegagalan kebijakan melalui diskusi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

Soren C. Winter (2003) menyebut pendekatannya sebagai "model terintegrasi" karena itu bukan implementasi yang berdiri sendiri. Model terintegrasi menunjukkan bahwa implementasi yang efektif ditentukan dari konseptualisasi melalui penilaian, menyiratkan bahwa proses politik dan administrasi saling terkait satu sama lain. Menurut Winter, implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh desain kebijakan itu sendiri, yang pada dasarnya lahir atau diputuskan oleh perumusan kebijakan. Faktor lain yang menentukan adalah keadaan sosial ekonomi masyarakat. Pengaturan di mana suatu kebijakan diimplementasikan dapat berdampak besar pada kebijakan. Menurut Winter, implementasi kebijakan terkait dengan perilaku organisasi terdepan sebagai pelaksana kebijakan, perilaku antar organisasi terkait, dan perilaku kelompok sasaran kebijakan.

Variabel-variabel yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan menurut Winter (2003) sebagai berikut:

1) Perilaku organisasi dan antarorganisasi (*Organizational and interorganizational behavior*).

Dimensi-dimensinya adalah komitmen dan koordinasi antar organisasi. Penerapan kebijakan publik dalam mencapai hasil yang optimal, jarang berlangsung dengan kelompok sendiri, tanpa menggunakan organisasi lain sebagai pendukung atau piranti pelaksana.

2) Perilaku Birokrasi Level Bawah (*Street Level bureaucratic behavior*)

Dimensinya adalah diskreasi. Variabel selanjutnya menjadi faktor kunci dalam implementasi kebijakan adalah perilaku birokrasi level bawah. Hal ini dimaksudkan sebagai kemampuan untuk melaksanakan dan menjalankan program-program sebagai keputusan penting dengan menggunakan pengaruh yang lebih dominan diluar kewenangan formal (diskresi).

3) Perilaku kelompok sasaran (*target grup behavior*).

Perilaku kelompok sasaran (*target grup behavior*) yang tidak hanya memberi pengaruh pada efek/dampak kebijakan, tetapi juga mempengaruhi kinerja birokrat/aparat tingkat bawah. Dimensinya mencakup respon positif dan negatif masyarakat dalam mendukung atau tidak mendukung kebijakan. Variabel perilaku target grup dalam implementasi kebijakan publik adalah sekelompok orang, organisasi, atau individu penerima jasa yang berperan bukan hanya dari sisi dampak kebijakan, tetapi juga

dalam mempengaruhi kinerja implementasi program melalui tindakan positif dan negatif.

1.6.2. Sistem Informasi

Dalam bukunya yang berjudul “Analisis Sistem Informasi” Sutabri, (2012) mendefinisikan sistem informasi sebagai sistem di dalam organisasi yang menggabungkan persyaratan untuk manajemen transaksi sehari-hari dengan tugas manajerial organisasi dalam operasi strategis sehingga laporan yang sesuai dapat dikirim ke pihak luar yang ditentukan. Pengertian Sistem Informasi menurut (Nasution et al., 2021) adalah perpaduan antara teknologi informasi dan perilaku orang-orang yang memanfaatkan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen. Kata "sistem informasi" sering digunakan untuk merujuk pada interaksi orang, proses algoritmik, data, dan teknologi dalam arti luas. Tujuan sistem informasi adalah untuk memproses data. Data diproses menjadi bentuk yang berguna bagi pengguna dalam sistem informasi. Informasi diyakini lebih dari sekedar data yang diproses. Tiga pilar yang harus didukung agar informasi yang dihasilkan bernilai adalah: langsung ke orangnya, tepat waktu, dan tepat nilainya.

Sistem informasi, menurut beberapa teori sistem informasi, adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan dan terorganisir dengan tujuan menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan.

Adapun teori keberhasilan suatu sistem informasi yang di cetuskan oleh (Delone & McLean, 1992) bahwa kesuksesan sistem informasi terdiri dari enam variable yaitu:

1. *System Quality* sebagai menilai kualitas sistem teknologi informasi organisasi.
2. *Information Quality* adalah metrik yang digunakan untuk menilai kualitas keluaran suatu sistem informasi.
3. *Use* adalah proses di mana penerima/pengguna memanfaatkan keluaran sistem.
4. *User Satisfaction* mengacu pada reaksi pengguna terhadap keluaran suatu sistem informasi.
5. *Individual Impact* mengacu pada pengaruh pengetahuan terhadap perilaku individu.
6. *Organizational Impact* adalah pengaruh pengetahuan terhadap berfungsinya suatu organisasi.

Singkatnya, hubungan antara kualitas sistem dan kualitas informasi mempengaruhi komponen penggunaan dan kesenangan pengguna secara terpisah dan bersama-sama. Besarnya unsur kegunaan (*use*) dapat berdampak positif atau negatif terhadap besarnya nilai kesenangan pemakai (*user satisfaction*). Dampak individu (*individual impact*) dan dampak organisasional (*organizational effect*) dipengaruhi oleh penggunaan (*use*) dan kepuasan pengguna (*user satisfaction*).

1.6.3. Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Saat memasuki revolusi industri keempat, peran teknologi informasi dalam membantu administrasi dan manajemen pemerintahan sangat penting dan menentukan kinerja pemerintah. Informasi telah menjadi salah satu aset yang sangat penting dan berharga untuk ditangani secara tepat karena kemajuan teknologi informasi. Sebagai negara berkembang dalam masa transisi, seluruh masyarakat Indonesia membutuhkan aplikasi teknologi informasi yang dapat diandalkan sebagai platform utama untuk menyediakan layanan dan mendukung pengambilan keputusan eksekutif. Mewujudkan kawasan terpadu dengan sistem informasi tunggal merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan pemerintah dalam upaya pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan memmembuat pilihan yang lebih tepat dan tepat waktu.

Berdasarkan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) merupakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya yang saling berkaitan untuk di manfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Adapun ruang lingkup SIPD meliputi Informasi Pembangunan Daerah, Informasi Keuangan Daerah, dan Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya. Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyediakan informasi pemerintah sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 4 ayat 2 yang dibangun dan

di kembangkan untuk menghasilkan layanan informasi pemerintah daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik.

Pembangunan Sistem Informasi Pemerintah Daerah merupakan salah satu investasi pertama dalam pengembangan sistem informasi pemerintah Republik Indonesia yang lebih terintegrasi, yang mencakup tidak hanya teknologi informasi tetapi semua sistem informasi. Tidak ada tujuan lain dari pengembangan Sistem Informasi selain untuk menciptakan infrastruktur yang andal yang mendukung pemenuhan kegiatan negara, khususnya di bidang pemerintahan yang baik dengan akuntabilitas tinggi dan mendapatkan kepercayaan penuh masyarakat. Tata pemerintahan yang baik adalah konsep pelayanan publik yang efisien dan adil yang mencakup spektrum sosial ekonomi dan terkait dengan tanggung jawab eksekutif, legislatif, dan yudikatif dari lembaga administrasi negara. (Badan Perencanaan Pembangunan daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kaur, 2008)

1) Jenis Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 yang mengategorikan macam-macam SIPD yang dapat dibentuk oleh Pemerintah Daerah menjadi beberapa kategori (Mendagri, 2019).

a) Informasi Pembangunan Daerah

SIPD dapat mengelola informasi dan data yang terkait dengan perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan

pemangku kepentingan utama. SIPD dapat membantu pemmembuatan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA PD, dan RENJA PD, sehingga memudahkan dalam memperoleh analisis dan profil pelaksanaan pembangunan daerah serta menjadi landasan pemutakhiran data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Keadaan topografi daerah, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing daerah merupakan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan.

b) Informasi Keuangan Daerah

SIPD mampu menangani data keuangan daerah secara lebih efektif dan efisien melalui pemangku kepentingan terkait dengan tetap berpegang pada prinsip akuntabilitas dan keterbukaan. Tata cara pengelolaan keuangan daerah yang dipermasalahkan antara lain:

1. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah
2. Perencanaan Anggaran Daerah
3. Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah
4. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
5. Informasi Keuangan Daerah lainnya
6. Pertanggung Jawaban Barang Milik Daerah

Pengelolaan data keuangan daerah sangat penting, terutama untuk menghindari penyalahgunaan wewenang,

khususnya di ranah keuangan daerah. Pengunduhan APBD dan coding akan dijadwalkan secara mendalam dan diterapkan dengan benar selama fase perencanaan, sehingga menghasilkan pelaporan yang lebih akurat dan tepat waktu. Pengkategorian kegiatan secara nasional juga berguna untuk menghubungkan data keuangan daerah dengan sistem informasi pemerintah pusat, khususnya untuk penyampaian laporan pertanggungjawaban.

c) Informasi Pemerintah Daerah Lainnya

SIPD juga mampu memberikan informasi umum lebih lanjut tentang tata kelola. Informasi umum tersebut dapat berupa laporan satu tahun tentang penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD), PERDA, atau informasi umum lainnya yang dikendalikan oleh pemangku kepentingan terkait.

Untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik sesuai dengan ketentuan hukum keterbukaan informasi No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan syarat minimal bagi warga negara untuk mengakses informasi publik dengan sistem informasi pemerintah daerah. Tujuan pengelolaan SIPD adalah untuk melakukan pengelolaan informasi daerah secara profesional yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menyediakan informasi pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional, dan keterbukaan informasi publik memberikan insentif kepada pemerintah untuk merencanakan dan berinovasi mengembangkan pembangunan (Sudianing & Seputra, 2019).

1.6.4. Perencanaan Pembangunan Daerah

Pembangunan adalah upaya terus-menerus untuk menciptakan keadaan yang memungkinkan setiap insan bangsa mengejar ambisinya yang paling manusiawi (Trigunarso & Indra, 2017). Definisi perencanaan dapat diartikan dalam banyak hal, antara lain sebagai berikut: bila dilihat dari kacamata aktivitas manusia, di mana perencanaan dipahami sebagai proses pemikiran dan tindakan manusia yang diarahkan ke masa depan. Selain itu, dari sudut pandang logis, perencanaan adalah prosedur untuk menentukan aktivitas yang dapat diterima melalui tahapan pemilihan. Selain itu, dari perspektif pemecahan masalah, perencanaan adalah prosedur pemecahan masalah yang ditargetkan pada jenis tantangan tertentu.

Pembangunan adalah cara untuk mencapai tujuan suatu negara. Banyak variabel yang mempengaruhi evolusi ini saling terkait. Pembangunan tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan melalui suatu proses yang disebut perencanaan pembangunan, dimana pemerintah memegang peranan yang paling penting, khususnya dalam proses perencanaan (Elviza, 2018).

Menurut Friedmann (1989) Perencanaan akan menghadapi tantangan mendasar, yaitu bagaimana informasi perencanaan teknis

dapat digunakan untuk menginformasikan tindakan publik. Perencanaan digambarkan sebagai komponen yang menghubungkan pengetahuan dengan tindakan/tindakan di ranah publik atas dasar ini. Friedmann mengatakan bahwa perencanaan harus berusaha untuk membantu masyarakat secara umum. Menurut Listyaningsih (2014) istilah "perencanaan pembangunan" mengacu pada metode untuk menentukan bagaimana sesuatu akan digunakan. Untuk mencapai tujuan kondisi sosial ekonomi yang lebih efektif dan efisien, sumber daya pembangunan yang tersedia.

Menurut Riyadi Deddy, Perencanaan Pembangunan Daerah adalah proses tahapan perencanaan yang menggabungkan berbagai komponen untuk menggunakan dan mendistribusikan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di lingkungan wilayah atau daerah selama periode waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah merupakan tugas yang sulit karena harus berhadapan dengan berbagai persoalan yang sangat rumit dan luas yang mempengaruhi banyak elemen sosial masyarakat sebagai akibat dari kondisi yang ada di wilayah terkait. Oleh karena itu, agar kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tercapainya efisiensi dan efektifitas, maka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah sangat diperlukan.

Seiring berkembangnya zaman dimana teknologi informasi semakin dibutuhkan di setiap sektor, saat ini banyak instansi pemerintah mulai menggunakan perencanaan pembangunan daerah

berbasis teknologi informasi untuk menunjang dan mempercepat proses penginformasian program perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat.

1.6.5. Pemerintah Daerah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tugas Pemerintahan daerah Mengusulkan rancangan Peraturan Daerah, menetapkan Peraturan Daerah yang telah disetujui DPRD, menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD, membahas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dengan DPRD, dan mengupayakan pemenuhan kewajiban daerah untuk mewakili daerahnya di luar atau dalam Asas Pemerintah Daerah.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah, tidak terlepas dari asas-asas tertentu penyelenggaraan pemerintahan suatu negara, khususnya sebagai berikut:

a. Asas desentralisasi

Konsep desentralisasi mengacu pada pelimpahan kekuasaan pemerintah kepada daerah-daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menerapkan konsep desentralisasi

berarti memberikan kekuasaan dan akuntabilitas yang utuh kepada daerah.

b. Asas dekonsentrasi

Konsep dekonsentrasi menyatakan bahwa masalah pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah daerah melalui pejabatnya tetapi tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat untuk perencanaan, pelaksanaan, dan keuangan. Instansi vertikal berfungsi sebagai unsur pelaksana dan secara operasional dipimpin oleh kepala daerah dalam kapasitasnya sebagai agen pemerintah pusat.

c. Asas tugas pembantuan

Asas pembantuan mengacu pada kewenangan pemerintah pusat untuk perumusan kebijakan, perencanaan, dan keuangan, yang tetap pada pemerintah pusat tetapi dilaksanakan oleh otoritas daerah. Tanggung jawab tugas pembantuan tidak diatur dalam UUD 1945, tetapi ditetapkan dalam kenyataan.

1.6.6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor

Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor (Bappedalitbang) merupakan salah satu instansi teknis daerah Pemerintah Kabupaten Bogor dan dibentuk mengikuti Peraturan Bupati (PerBup) Kabupaten Bogor Nomor 69 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Peran sentral Bappedalitbang, menurut Perbup, adalah membantu Bupati dalam merancang dan melaksanakan kebijakan daerah dalam perencanaan pembangunan daerah.

1.7. Definisi Konseptual

- a. Implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut.
- b. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) adalah sistem informasi yang memuat sistem perencanaan pembangunan daerah, sistem keuangan daerah, dan sistem pemerintahan daerah lainnya yang saling terkait yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan daerah, termasuk sistem pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah.

1.8. Definisi Operasional

Definisi operasional akan mempermudah dalam menganalisis data dengan memberi batasan-batasan dan gejala-gejala yang diidentifikasi sesuai tujuan untuk menjawab masalah dalam penelitian. Terkait hal tersebut, peneliti tidak memasukan semua jabaran dari bagian-bagian teori ke dalam definisi operasional, tetapi memilihnya berdasarkan ketersediaan data di lapangan. Berdasarkan model implementasi Winter (2003) variabel-variabel yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.
Definisi Operasional

Tujuan	Variabel	Indikator
Mengetahui penerapan SIPD dalam pembangunan daerah di Bappedalitbang Kabupaten Bogor.	Perilaku organisasi dan antarorganisasi (<i>Organizational and interorganizational behavior</i>)	1 Komitmen 2 Koordinasi antar organisasi 3 Penerapan kebijakan publik
	Perilaku Birokrasi Level Bawah (<i>Street Level bureaucratic behavior</i>)	1 Kontrol Organisasi 2 Kemampuan untuk menjalankan program
	Perilaku kelompok sasaran (<i>target grup behavior</i>).	1 Respon positif dari organisasi 2 Respon negatif dari organisasi 3 Dampak kebijakan terhadap kinerja organisasi

1.9. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian perlu di ketahui jenis penelitian yang digunakan terlebih dahulu untuk mengetahui gambaran yang jelas dalam penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut, sehingga memudahkan langkah selanjutnya dalam proses analisis data.

Dalam penelitian yang di lakukan mengenai “**Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Pembangunan Daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor**”, menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deksriptif yang dimaksudkan tujuannya adalah untuk memmembuat deskripsi, gambaran, atau tulisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antara masalah yang sedang di selidiki. Metode ini digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan maupun lisan dari wawancara semi-terstruktur dengan informan terkait dan situasi atau kondisi yang diamati serta digabungkan dengan pengumpulan data dari dokumen resmi.

Selain itu, untuk menganalisanya menggunakan data kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivism. Metode ini di sebut juga metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan di sebut sebagai metode interpretive karena data yang di hasilkan lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang di temukan di lapangan (Sugiyono, 2019). Adapun alasan peneliti memilih metode kualitatif karena metode kualitatif mempunyai teori

pendekatan yang mendukung analisa yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi di kembangkannya SIPD dalam pembangunan daerah di Kabupaten Bogor. Pendekatan ini dilakukan dalam menganalisis hasil wawancara terkait persepsi mengenai SIPD di BappedaLitbang dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah. Metode ini digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan maupun lisan. Menurut Suryabrata (2010) penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang bermaksud untuk memmembuat deskripsi (pencandraan) terkait situasi atau fenomamena.

Penelitian jenis ini bertujuan untuk memberikan deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu (Suryabrata, 2010). Metode analisis dalam peneltian ini adalah analisis isi (*Content Analysis*). Metode ini dipilih berdasarkan pertimbangan karakteristik data dan informasi dalam bentuk dokumen resmi dan transkrip wawancara menuntut pemahaman yang kuat tentang interpretasi teks untuk mengidentifikasi keluaran/hasil berupa interpretasi yang sesuai dari data yang diterima. Analisis ini mungkin bermanfaat bagi peneliti untuk mendefinisikan informasi yang berasal dari informan atau *stakeholder* dan dokumentasi milik pemerintah daerah menjadi temuan-temuan yang mengarahkan pada penemuan penyimpulan bagaimana penerapan sistem informasi pemerintah daerah yang sedang di teliti. Adapun unit yang akan di analisis berupa jurnal-jurnal, buku-buku, dan internet terkait dan mendukung keabsahan dan kebenaran dari perolehan hasil penelitian ini, beserta dokumen resmi. Dokumen resmi tersebut berupa RPJMD Kabupaten Bogor tahun 2018-2023,

Rencana Strategis tahun 2018-2023, RENJA, Standar Operasional Prosedur Internal, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Laporan Kegiatan dan dokumen-dokumen yang berasal dari unit analisis lainnya yang mendukung dan menjawab pertanyaan dalam penelitian ini.

Alasan digunakannya metode kualitatif selain sesuai dengan judul yang sudah di paparkan di atas adalah sumber data dan sifat-sifat dari data yang akan dikumpulkan. Ditinjau dari sumber data dan sifat-sifat data, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif dimana peneliti terjun ke lapangan untuk melakukan eksplorasi terhadap objek penelitian yang mana harus mengumpulkan data serta fakta yang berkaitan dengan judul penelitian agar dapat mengidentifikasi permasalahan ataupun menemukan jawaban dari perumusan masalah yang sudah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, kurang tepat untuk menggunakan metode kuantitatif yang menempatkan fokus yang lebih besar pada pembuktian hipotesis melalui penggunaan angka dan statistik untuk menggambarkan kejadian. Oleh karena itu, untuk memperoleh data yang menyeluruh, mendalam dan memberikan respon yang benar terhadap topik yang diteliti maka digunakan metode kualitatif.

1.9.1. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengambil objek penelitian pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor. Ruang lingkup penelitian ini hanya pada variabel-variabel yang berkaitan dengan komitmen, koordinasi, sumber daya manusia di Bappedalitbang yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan menggunakan SIPD sehingga menghasilkan dokumen atau informasi yang berkualitas.

1.9.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bogor, tepatnya di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor sebagai objek lokasi penelitian yang mengelola aplikasi SIPD. Bappedalitbang Kabupaten Bogor menjadi fokus penelitian karena pentingnya untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem informasi pemerintah daerah terutama dalam perencanaan pembangunan daerah.

1.9.3. Subjek Penelitian

Partisipan dalam penelitian ini ditujukan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor yang mengelola SIPD di Kabupaten Bogor. Subjek dari penelitian yang sifatnya kualitatif ini yakni berbagai pihak yang dijadikan sebagai sasaran penelitian atau sumber yang dapat memberikan informasi di pilih secara tetap atau yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Teknik pengambilan yang digunakan adalah *snowball sampling*, menurut Nasution (2002) *snowball sampling* tepat untuk digunakan dalam penelitian dimana sample berasal dari informan atau narasumber yang dapat memberikan informasi. Teknik *snowball sampling* digunakan oleh peneliti karena mempertimbangkan faktor-faktor tertentu yang diperkirakan akan muncul selama penelitian. Misalnya, data yang diperoleh dari faktor-faktor ini tidak cukup untuk memenuhi kapasitas. Karena sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang cukup, maka teknik *snowball sampling* digunakan untuk mengambil sumber data yang

awalnya sedikit jumlahnya kemudian bertambah banyak. Hal ini dikarenakan sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, sehingga mencari informan lain yang dapat dijadikan sebagai sumber data (Sugiyono, 2017). Subjek ini bersifat tidak menyeluruh, hanya melibatkan aktor penting dari instansi pemerintah yang terkait.

Dalam menentukan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive* atau berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian. Informan atau responden akan diminta untuk menunjuk pihak lain yang juga memiliki informasi dan bersedia memberikan informasi kemudian hal ini terus berlanjut sampai mengumpulkan data yang cukup. Oleh karena itu subjek dalam penelitian ini ini ditentukan langsung oleh peneliti dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Subjek ini memiliki sifat yang tidak menyeluruh, hanya melibatkan instansi pemerintah daerah Kabupaten Bogor khususnya Bappedalitbang. Data utama dalam penelitian ini dari hasil survei dengan metode data primer atau sekunder. Hal tersebut dilakukan karena kebijakan dalam penelitian ini didasarkan pada kesiapan pemerintah, sehingga survei terhadap aktor-aktor terkait dalam pengelolaan sistem informasi pemerintah daerah. Alasan yang melatar belakangi hal ini adalah pentingnya mengetahui persepsi dari aktor pemerintah daerah dalam hal ini adalah Bappedalitbang dalam penerapan sistem informasi pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah.

Informan dalam penelitian ini yakni berbagai individu yang mampu menyajikan keakuratan informasi dan yang bertanggung jawab dalam menangani Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Untuk mendapatkan informasi yang akurat serta wawancara yang mendalam maka peneliti menggunakan *snowball sampling* dimana pemilihan informan kedua berdasarkan informasi dari informan pertama, informan ketiga berdasarkan rekomendasi informan kedua dan seterusnya. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah informan kunci dari instansi yang berkaitan dalam hal ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Adapun informan yang peneliti pilih ini karena memenuhi syarat keterwakilan (*representative*) dan juga syarat kesesuaian dengan penelitian. Beberapa informan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
2. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor
3. Operator Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bogor

Penentuan informan diatas berdasarkan pertimbangan peneliti terkait pihak instansi yang dapat menjadi perwakilan atau memberikan informasi terkait SIPD di Kabupaten Bogor.

1.9.4. Teknik Pengumpulan Data

Agar mendapatkan data yang diinginkan dalam penelitian, maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Merupakan bentuk komunikasi antara dua orang dimana melibatkan satu orang yang bertujuan mendapatkan informasi dari pihak yang diwawancarai dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan kebutuhan (Rosaliza, 2015). Dalam penelitian ini metode wawancara dilakukan untuk menggali informasi terkait faktor dan penerapan sistem informasi pemerintah daerah di Bappedalitbang, adapun instrumen pengumpulan datanya berupa pedoman pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya.

b. Dokumentasi

Studi dokumentasi memungkinkan peneliti mendapatkan pemahaman tentang hal yang diteliti, baik melalui media tekstual maupun dokumentasi terkait penelitian (Herdiansyah, 2014). Jadi, dokumentasi adalah kumpulan makalah yang memuat keterangan atau bukti tentang pengumpulan dan pengelolaan arsip secara sistematis serta menyebarluaskan kepada pemakai informasi tersebut. Peneliti memperoleh data dan dokumen-dokumen tertulis. Penulis membaca dan mempelajari berbagai tulisan dari buku-buku, jurnal-jurnal, dan internet yang berkaitan dan mendukung kebenaran dan keabsahan dari hasil yang diperoleh

dari penelitian ini, beserta dokumen resmi. Dokumen resmi tersebut berupa RPJMD Kabupaten Bogor tahun 2018-2023, Rencana Strategis tahun 2018-2023, RENJA, Standar Operasional Prosedur Internal, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Laporan Kegiatan dan dokumen-dokumen yang berasal dari unit analisis lainnya yang mendukung dan menjawab pertanyaan dalam penelitian ini.

c. Studi Literature

Studi literature merupakan teknik pengumpulan data yang membutuhkan dukungan dari sumber berupa buku-buku, dan berbagai perangkat media baik dari media masa maupun media elektronik. Pada tahapan ini peneliti melakukan kajian pustaka, yaitu mempelajari buku-buku referensi dan hasil penelitian sejenis sebelumnya yang pernah dilakukan orang lain. Tujuannya ialah untuk mendapatkan landasan teori mengenai persoalan yang akan diteliti dengan benar dan sesuai dengan kerangka pikir ilmiah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berbagai teori-teori yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti, dan juga berbagai bahan rujukan untuk mengumpulkan sejumlah literature seperti jurnal ilmiah, prosiding, buku, dan berita artikel dengan cara membaca, mempelajari dan mengkaji yang berkenaan dengan masalah dan tujuan penelitian.

d. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan dalam mengamati secara langsung terhadap objek penelitian, ini merupakan langkah awal untuk bisa mendapatkan data yang di butuhkan oleh peneliti (Danial, 2009). Penerapan observasi adalah instrumen yang paling penting dalam sebuah penelitian, karena memberikan peneliti gambaran tentang subjek yang diperiksa melalui pengamatan langsung. Cakupan informasi yang mendasari pengamatan penelitian ini meliputi evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal perencanaan pembangunan. Penilaian tersebut akan dibagi menjadi dua pendekatan analisis, yaitu penilaian melalui persepsi mengenai dampak diterapkannya sistem informasi pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah dan penilaian berdasarkan program pembangunan Kabupaten Bogor.

1.9.5. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah individu yang memahami informasi yang terkandung dalam objek penelitian, dan teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penentuan informan secara purposive dengan sengaja, teknik ini melibatkan identifikasi informan berdasarkan kriteria tertentu yang terkait dengan sumber data, seperti individu yang ahli materi pelajaran. Adapun informan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.
Daftar Informan Wawancara

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Arif Rachman Suhandi, S.IP., MM	Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Bappedalitbang Kabupaten Bogor
2.	Agustian, Sap.	Operator Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kabupaten Bogor
3.	Hari Adenovianto, SE	Staff Sub Bagian Program dan Pelaporan
4.	Faris Zakaria S.IP	Staff Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappedalitbang Kabupaten Bogor

1.9.6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan uji validitas data dalam proses pemmembuatan instrumen. Pengujian ini diperlukan karena penelitian kualitatif seringkali menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan data (validitas data), sehingga perlu dikembangkan suatu metode untuk memenuhi kriteria kebutuhan data. Ada beberapa metode untuk menentukan ketepatan data, Sugiyono (2012) menegaskan uji kredibilitas data atau keterpercayaan data dari hasil penelitian kualitatif, antara lain dengan perpanjangan pengamatan, triangulasi,

diskusi dengan rekan sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*. Pada penelitian ini, peneliti melakukan uji kredibilitas dengan menggunakan metode perpanjangan pengamatan, triangulasi, analisis kasus negatif dan *member check*.

A. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dilakukan untuk menilai keterpercayaan data penelitian, yang difokuskan pada pengujian data yang telah diperoleh. Benar atau tidaknya data yang diperoleh setelah dilakukan pengecekan ulang di lapangan. Jika data yang dikumpulkan selama ini terbukti tidak akurat setelah dikonfirmasi dari sumber data asli atau sumber lain, peneliti harus melakukan pengamatan tambahan yang luas dan mendalam. Kedalaman, keluasan, dan kepastian data akan menentukan seberapa jauh pengamatan ini dapat diperluas. Dengan memperpanjang durasi observasi, peneliti dan narasumber akan dapat membangun hubungan. Menurut Sugiyono (2012) memperpanjang masa observasi membuat hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk, semakin akrab, saling terbuka, dan saling percaya sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan.

Mengikuti keterbukaan narasumber, peneliti dapat mengecek kembali apakah data yang dikumpulkan tetap sama atau berbeda. Jika ada perbedaan, peneliti melakukan pengamatan yang lebih komprehensif dan mendalam untuk memastikan bahwa data tertentu benar. Akibatnya, di lapangan, perpanjang masa observasi

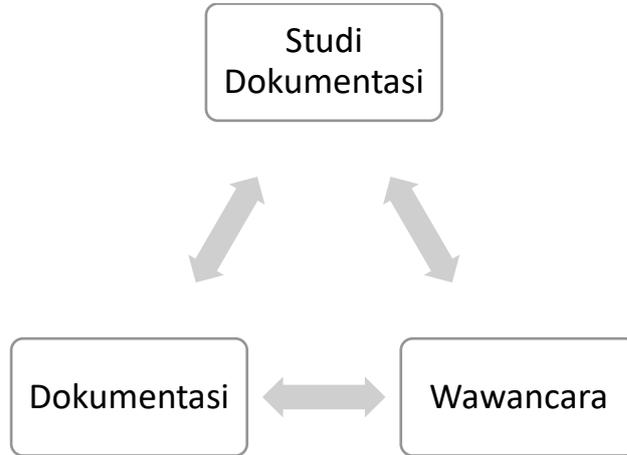
untuk mengevaluasi validitas data menjadi sangat penting. Perpanjangan waktu pengamatan dalam penelitian akan menguntungkan peneliti karena akan mendekatkan peneliti dan narasumber. kedekatan yang terbentuk dapat mengarah pada fakta yang lebih dapat diandalkan atau dipercaya. Jika semua data telah diperiksa ulang keakuratannya maka waktu perpanjangan dapat di teliti.

B. Triangulasi

Peneliti menggunakan triangulasi untuk menelaah data dengan menggunakan berbagai sumber, antara lain observasi lapangan, catatan lapangan, studi pustaka, dan diskusi dengan narasumber tentang data yang diperoleh peneliti untuk menjamin keabsahan data. Menurut wiliam Wiersma (dalam Sugiyono, 2012) dalam penelitian ini, triangulasi diartikan dalam berbagai cara dan pada periode yang berbeda. Untuk mendapatkan triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu, seperti pada gambar sebagai berikut:

Bagan 2

Triangulasi dengan tiga Teknik pengumpulan data



a) Triangulasi Sumber

Menurut Sugiyono (2012) triangulasi sumber mengacu pada proses pengumpulan informasi dari banyak sumber dan membandingkan hasilnya. Maka dari itu, peneliti dapat menyimpulkan bahwa triangulasi sumber dapat dilakukan dengan mengecek ulang data yang dikumpulkan dari responden.

b) Triangulasi Teknik

Menurut Sugiyono (2012) menunjukkan bahwa triangulasi teknis adalah perolehan berbagai data dengan menggunakan beberapa cara untuk memeriksa sumber data yang sama. Data dapat dikumpulkan dengan wawancara, dan kemudian diverifikasi melalui observasi, dokumentasi, atau survei.

Dapat disimpulkan bahwa ketiga pendekatan untuk menilai keabsahan data dapat memberikan data yang sama, memungkinkan

kesimpulan penelitiannya dapat disimpulkan. Namun, karena data yang dikumpulkan berbeda, peneliti mengadakan wawancara tambahan dengan sumber data yang sesuai untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh akurat.

Tujuan triangulasi data dapat diringkas memeriksa keakuratan data dan membandingkannya dengan data yang diperoleh dari sumber lain. Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dengan data dari sumber lain.

C. Analisis Kasus Negatif

Dalam situasi ini, peneliti mencari bukti yang bertentangan dengan data yang ditemukan sebelumnya sampai bukti tidak lagi bertentangan dengan kesimpulan. Jika datanya konsisten dengan apa yang ditemukan, maka data tersebut dapat dipercaya. Sugiyono (2012) endefinisikan contoh negatif sebagai contoh yang tidak sesuai atau menyimpang dari hasil studi hingga titik waktu tertentu. Sugiyono menegaskan ketika seorang peneliti melakukan analisis kasus negatif, maka berarti peneliti mencari bukti yang berbeda atau bertentangan dengan apa yang telah ditemukan. Jika tidak ada bukti lebih lanjut yang berbeda atau bertentangan dengan informasi yang diperoleh, maka informasi tersebut dianggap dapat dipercaya. Namun, jika peneliti terus menerima bukti yang bertentangan dengan temuan, ia dapat merevisi kesimpulannya.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahap ini, peneliti akan mencari data dari berbagai sumber yang relevan dengan penelitian sampai semua data yang dikumpulkan dari sumber-sumber tersebut setuju.

D. Member Check

Member check adalah proses dimana peneliti mengkaji data dari informan untuk melihat apakah hasilnya konsisten dengan apa yang diberikan atau diperoleh dari sumber tersebut melalui observasi dan wawancara. Tujuan *Member Check* adalah untuk melihat seberapa dekat data yang diambil cocok dengan apa yang diberikan oleh sumber data. Jika data yang ditemukan oleh peneliti dengan berbagai interpretasi disepakati oleh pemberi data, berarti data tersebut valid, sehingga lebih kredibel atau dapat dipercaya. Namun, jika data yang ditemukan peneliti dengan berbagai interpretasi tidak disepakati oleh pemberi data, peneliti harus berdiskusi dengan informan atau narasumber, dan jika perbedaannya signifikan, peneliti harus mengubah temuannya dan menyesuaikan dengan apa yang penyedia data menyediakan. Setelah data disetujui oleh kedua belah pihak, penyedia data diminta untuk menandatangani dokumen agar lebih asli. Selain itu sebagai bukti peneliti telah melakukan *Member Check*.